



HARIAN

EDISI JUMAT, 23 AGUSTUS 2024

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

RUU PILKADA BATAL TETAP KAWAL!

Ricuh di Jakarta hingga Semarang,
159 Demonstran Diduga Ditangkap



**GOVERNMENT (Hal.2)
Berantas Judi Online,
OJK: Semua Rekening
Pelaku Diblokir!**

Aksi massa dari berbagai elemen menolak pengesahan revisi UU Pilkada 10/2016 pada Kamis (22/8/2024) serentak merebak di berbagai pelosok Indonesia. Kabar baiknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada setelah rapat paripurna DPR untuk pengesahan revisi undang-undang tersebut sempat ditunda. Dipastikan lada saat pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan mengikuti aturan MK dan segera menindaklanjutinya ke dalam peraturan KPU (PKPU). Guru besar hingga pengamat menyerukan masyarakat saat ini belum boleh lengah dna terus mengawal. Diingatkan, publik tetap berisiko kena "prank" DPR RI dan pemerintah. Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap aksi kelam aparat. Intimidasi hingga kekerasan fisik tanpa mengedepankan prinsip humanis, mewarnai demo tersebut. Bahkan meski ditepis ada penahanan terhadap pendemo, Komnas HAM meminta agar Polda Metro Jaya segera melepas 159 peserta aksi.

Baca Hal 11....

Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tolak RUU Pilkada di berbagai wilayah Indonesia, Kamis (22/8/2024). (ist,kum,ant)

Berantas Judi Online, OJK: Semua Rekening Pelaku Diblokir!



Upaya Pemberantasan Judi Online

TEGAKKAN HUKUM

DAN REGULASI

- KUHP Pasal 303, tentang perjudian secara umum, ancaman penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp10 juta

- UU 11/2008 tentang ITE, ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar

- Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisa data digunakan untuk melacak dan memblokir situs judi online.

BENTUK SATGAS

PEMBERANTASAN

JUDI ONLINE

- Satgas dibentuk berdasarkan Keppres 21/2024 dipimpin Menkopohukum, dan melibatkan Kemkominfo, OJK, PPAATK, dll.

PUTUS AKSES,

BLOKIR REKENING

- Per 18 Agustus 2024, sebanyak 3.848.109 konten judi online di ruang digital ditutup aksesnya.

- Sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024, sebanyak 555 akun e-wallet dan 5.779 rekening bank telah diajukan kepada OJK untuk ditutup/ diblokir.

SOSIALISASI DAN

EDUKASI

- Sosialisasi bahaya judi online di berbagai media, termasuk SMS blast, iklan layanan masyarakat, dan media sosial



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memberikan sambutan saat acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Ist)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berusaha memerangi aktivitas keuangan ilegal dan judi online di Tanah Air. Ditegaskan, masih banyak kelompok masyarakat yang rentan secara keuangan dan perlu mendapat perhatian khusus.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar mengatakan masyarakat yang rentan tersebut termasuk perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdekat, tertinggal dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Di tengah capaian dan optimisme, kita harus menghadapi tantangan yang masih terjadi dengan maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online. Kita juga masih mendapati beberapa kelompok masyarakat yang rentan secara keuangan dan perlu mendapat perhatian khusus," kata Mahendra dalam peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Mahendra menyebut berbagai terobosan telah dilakukan pihaknya untuk menjawab tantangan itu. Terkait judi online, OJK mengaku telah memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening dan meminta agar rekening lain terkait konsumen yang sama ditutup.

"OJK telah memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang dimiliki konsumen yang sama," ucap Mahendra.

Terkait aktivitas keuangan ilegal, OJK telah menghentikan 1.740 entitas keuangan ilegal sepanjang Januari-Juli 2024, terdiri dari 1.591 pinjol ilegal dan 149 investasi ilegal. Jika ditotal

dari 2017, terdapat 9.889 entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan.

"(OJK telah) menghentikan 10.000 entitas keuangan ilegal," bebernya.

Ke depan, OJK akan membentuk Anti-Scam Centre (ASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (PUSAKA) bersama kementerian/lembaga terkait. Hal ini untuk menangani berbagai kasus terkait dengan cepat dan memberikan efek jera bagi pelaku.

"Kami mengharapkan PUSAKA akan mewujudkan penanganan yang cepat dan berefek jera terhadap beragam bentuk penipuan di sektor jasa keuangan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menghadiri acara peluncuran gerakan nasional cerdas keuangan (Gencarkan) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024) siang.

Jokowi dijadwalkan menghadiri acara tersebut bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Di sekitar area acara, terlihat sejumlah pengamanan Paspampres yang telah berjaga sejak pagi.

Namun, hingga acara dimulai pada pukul 14.00 WIB, Jokowi tidak kunjung hadir. Acara pun hanya dibuka dengan sambutan dari Airlangga.

Belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai Jokowi yang urung tiba ke acara tersebut. Sementara itu, sejak pagi Jokowi telah memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana terlihat tiba di Istana untuk memenuhi panggilan Jokowi pada pukul 09.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, Jokowi juga menerima kunjungan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menkominfo Ancam Bigo Live

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengancam memblokir akses Bigo Live dan menjalankan langkah-langkah hukum menyusul temuan konten judi online dan pornografi di aplikasi tersebut.

"Apabila pihak Bigo Live tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan judi online dan pornografi ini, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbatas pada pemblokiran aplikasi Bigo Live di Indonesia," katanya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimmkan surat teguran kedua kepada PT Bigo Technology Indonesia pada Rabu, 21 Agustus 2024, menyusul temuan konten judi online dan pornografi di Bigo Live.

Melalui surat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa PT Bigo Technology Indonesia harus segera menghapus seluruh konten negatif yang beredar di aplikasi Bigo Live.

"Bigo Live juga wajib meningkatkan sistem moderasi untuk mencegah munculnya kembali konten negatif di masa mendatang," kata Budi Arie dalam surat tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam patroli siber tanggal 26 Mei hingga 8 Agustus 2024 mendapati 121 akun terkait konten judi online di aplikasi Bigo Live.

Selain itu, dalam patroli siber tanggal 15 hingga 18 Agustus 2024 didapati 32 akun terkait konten pornografi di aplikasi Bigo Live.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti temuan itu dengan mengirimmkan surat teguran kepada PT Bigo Technology Indonesia pada 16 Juli dan 21 Agustus 2024.

"Saat ini, kami masih menemukan konten ilegal pada platform Bigo Live," kata Budi Arie.

Konten terkait pornografi dan perjudian dilarang disebarluaskan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(tro,rls,ist/dya)



PDIP Umumkan 169 Cakada, Calon Gubernur Jawa Timur Belum

JAKARTA-DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman gelombang kedua ini dilakukan secara hybrid.

Dari 169 calon Kepala Daerah itu terdiri dari 6 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 151 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 12 bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota. Namun tidak ada bakal calon dari Jatim, Jateng, dan DKI Jakarta.

Pembacaan nama-nama calon Kepala Daerah yang diusung disampaikan oleh Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDIP di Kantor Pusat Partai, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Pengumuman ini dilakukan di hadapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan jajaran DPP PDIP sejumlah petinggi partai.

Terlihat hadir juga Prananda Prabowo putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif.

Mahfud MD Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga tampak hadir dalam acara tersebut.

Setelah pembacaan, perwakilan calon Kepala Daerah yang diusung menerima penyerahan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDIP. Megawati menyerahkan SK tersebut kepada calon kepala daerah, didampingi oleh Prananda Prabowo putranya.

Pengumuman 169 Calon Kepala Daerah dari PDIP ini merupakan gelombang kedua dari tiga gelombang yang akan dilakukan DPP PDIP dalam menghadapi Pilkada 2024.

Sebelumnya, PDI Perjuangan telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada gelombang pertama di 14 Agustus 2024. Untuk bakal calon kepala daerah PDIP di Jakarta, Hasto mengatakan masih menantikan keputusan akhir dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Untuk Jakarta masih menunggu pengumuman dari Ibu Ketua Umum," kata Hasto.

Berpesan soal Utang dan PHK

Dalam kesemaoatan itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato usai memberikan dukungan kepada sejumlah bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (22/8/2024). Ist

Soekarnoputri kembali menyindir Pemerintahan Presiden Jokowi soal utang dan pendapatan negara yang kini membuat rakyat Indonesia semakin sulit.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" ujarnya di DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari wilayah Garut Jawa Barat, di mana banyak pabrik sarung yang tutup, sehingga ribuan pekerja pabrik dirumahkan. "Tanya deh sana, keliling ke tempat-tempat pabrik sarung. Itu kan saya dengar mulai banyak yang tutup lho," imbuhnya.

Selain itu, Megawati juga mengkritisi sikap pemerintah hari ini yang tidak bisa menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, selain ekonomi Indonesia sulit, harga pangan pun terkerek naik. "Sudah PHK, harga pangan apalagi beras juga naik. Ini saya serius lho, saya kan Ibu rumah tangga juga," katanya.

Megawati mengingatkan para calon kepala daerah dari PDI agar tidak seenaknya dan memikirkan nasib rakyat. "Makanya jangan mau enak wae jadi kepala daerah. Ini saya ngomong bener lho," ujar Megawati.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto

(PDB) Indonesia pada April 2024.

Sementara itu, belakangan terjadi gelombang PHK di industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Diketahui, Pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun pertama diperkirakan akan membayar Rp552,9 triliun untuk bunga utang yang tertuang di RAPBN 2025.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan II yang dirilis Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (22/8/2024), pembayaran bunga utang untuk utang dalam negeri dan luar negeri.

Pembayaran bunga utang dalam negeri direncanakan sebesar Rp497,62 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55,23 triliun.

Bila dilihat secara rinci, pembayaran bunga utang terus mengalami kenaikan. Pada 2025 ini naik 10,8 persen dibandingkan outlook APBN 2024 yang sebesar Rp499 triliun.

Pada 2020, pembayaran bunga utang hanya Rp314,1 triliun, lalu naik menjadi Rp343,5 triliun di 2021 dan 2022 naik lagi menjadi Rp386,3 triliun. Kemudian pada 2023 naik lagi menjadi Rp439,9 triliun.

Selain itu, pada tahun depan pemerintahan Prabowo juga akan menarik utang sebesar Rp775,9 triliun yang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,6 triliun dan pinjaman Rp133,3 triliun. (sum,rls,ist/dya)

WARISAN UTANG DARI ZAMAN KE ZAMAN

- ERA SOEKARNO**
Hingga akhir pemerintahan Soekarno, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 29 persen terhadap PDB pada saat itu.
- ERA SOEHARTO**
Pada masa kepemimpinan Soeharto (Maret 1967-Mei 1998), utang pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB.
- ERA HABIBIE**
Utang luar negeri pemerintah naik Rp 387,4 triliun menjadi Rp 938,8 triliun. Saat itu, rasio utang pemerintah mencapai 85,4 persen dari PDB.
- ERA GUS DUR**
Pada periode Abdurrahman Wahid (1999-2001), utang Indonesia naik menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US\$ 122,3 miliar (setara 77,2 persen dari PDB).
- ERA MEGAWATI**
Kala era kepresidenan berganti ke Megawati Soekarnoputri (2002-2004), utang pemerintah tercatat Rp 1.298 triliun atau US\$ 139,7 miliar, dengan rasio utang 56,5 persen dari PDB.
- ERASBY**
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014). Pada akhir kepemimpinan SBY, utang mencapai Rp 2.608,8 triliun atau US\$ 209,7 miliar dengan rasio utang 24,7 persen dari PDB.
- ERA JOKOWI**

2014 : Utang pemerintah tercatat sebesar Rp2,61 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB 24,7%.

2015 : Utang meningkat menjadi Rp3,17 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB 27,5%.

2016 : Utang mencapai Rp3,52 kuadriliun dengan rasio utang 28,3%.

2017 : Utang pemerintah meningkat menjadi Rp3,99 kuadriliun dengan rasio utang 29,4%.

2018 : Utang tercatat Rp4,47 kuadriliun, rasio utang terhadap PDB sebesar 29,8%.

2019 : Utang meningkat menjadi Rp4,78 kuadriliun dengan rasio utang 30,2%.

2020 : Utang melonjak menjadi Rp6,08 kuadriliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 39,4%.

2021 : Utang naik menjadi Rp6,91 kuadriliun dengan rasio utang 40,7%.

2022 : Utang tercatat Rp7,73 kuadriliun, dengan rasio utang 39,5%.

2023 : Utang mencapai Rp8,14 kuadriliun, sementara rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,1%.

2024 (proyeksi) : Utang diperkirakan meningkat menjadi Rp8,7 kuadriliun dengan rasio utang 38,5%.

Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Diperiksa KPK, Mendes Halim Iskandar Irit Bicara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar, Kamis (22/8/2024). Gus Halim--begitu sapaannya-- menjadi saksi dalam penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Diperiksa hampir enam jam, kakak Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar itu mengaku sudah memberikan keterangan terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah di Jatim.

"Seperti yang sampaikan tadi saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dengan permasalahan dana hibah di Jawa Timur. Semua sudah saya jelaskan klir, terserah pihak penyidik, jadi, semua sudah saya sampaikan," kata Abdul Halim di Gedung KPK, Kamis (22/8/2024).

Abdul Halim membantah pemeriksaannya dalam kasus itu karena dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019). Patut diketahui, kasus korupsi ini merupakan bancakan pada APBD 2019-2022.

"Pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan, bisa DPRD, bisa setelahnya, bisa macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB tanpa didampingi kuasa hukumnya.

"Ya, itu kalau di surat panggilannya terkait dengan masalah Jawa Timur," kata Halim saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ia mengaku tidak ada persiapan khusus soal pemeriksaan tersebut dan akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahuinya.

"Enggak ada (persiapan) ya, apa pun yang ditanya, saya jawab nanti sesuai dengan apa yang ada," tuturnya.

Geledah Kantor Pemprov

Sebelumnya, KPK juga telah mengeledah Kantor Pemprov Jawa Timur berkaitan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2019-2022.

Dari informasi sementara, tim penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik pada penggeledahan tersebut.

"Kami masih menginventarisir dokumen dan barang bukti (yang disita). Update akan kami sampaikan apabila kegiatan sudah selesai," jelas Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat (16/8/2024).

Tidak hanya di Kantor Pemprov



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar diperiksa KPK sebagai saksi suap dana hibah Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/8/2024).ant

Jatim, KPK juga akan melakukan penggeledahan di tempat lain dalam kasus yang sama.

"Kemungkinan akan ada lagi (penggeledahan di tempat lain). Kita tunggu saja kegiatan penyidik di lapangan selesai, baru nanti di-update," pungkas Tessa.

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada Jumat (12/7/2024), mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022.

"Mengetahui nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6

bulan penjara," kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menepuni uang pengganti.

"Jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," ucap Suardhita.

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar Pasal 12 a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi.

"Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi," ucap hakim I Dewa Suardhita.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik Sahat Tua P. Simanjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK Arif Suhermanto menerima vonis itu meskipun lebih rendah dari tuntutan.

"Kami merasa putusan yang dijatuhkan hakim ini memenuhi rasa keadilan di masyarakat, jadi kami

Fakta-fakta Korupsi Dana Hibah di Jatim

10 JULI 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 12 tersangka baru dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). 4 orang diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

26 SEPTEMBER 2023

Sahat Tua P. Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Hak politiknya juga dicabut selama 4 tahun setelah menjalani hukuman. Ia melanggar pasal 12a juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AWAL KASUS

Sahat Tua Simanjuntak, yang terjaring OTT KPK pada Desember 2022, bersama Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng untuk pencairan dana hibah Pokmas. Selama 2020-2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah dicairkan. Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi divonis 2,5 tahun penjara sebagai justice collaborator.

KONTRUKSI KASUS

Pada 2020-2021, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp7,8 triliun untuk hibah kepada badan, lembaga, dan ormas, termasuk melalui Pokmas untuk proyek infrastruktur. Pengusulan dana dilakukan oleh anggota DPRD, seperti Sahat, yang menawarkan bantuan dengan kesepakatan uang muka, diterima Abdul Hamid.

memutuskan untuk menerima putusan yang mulia," ucap Arif.

Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada bulan Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya, Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.

Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas). Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan oleh Sahat.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator. (tro,rls,ist/dya)

Saat Hubungan dengan PKB Renggang, PBNU Resmi Dapat 26.000 Ha Tambang

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/8/2024). Usai membahas konsesi tambang batu bara, PBNU resmi menerima konsesi tambang 26.000 Hektare di Kalimantan Timur.

Lahan tambang tersebut merupakan bekas Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie.

"Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu, sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," jelas Yahya kepada wartawan.

Yahya menargetkan, lahan tambang tersebut mulai dieksplorasi pada Januari 2025 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). "Segera, karena IUP sudah keluar mudah-mudahan Januari (2025) sudah bisa bekerja. Sudah (legal)," terangnya.

Namun, Yahya mengakui sampai saat ini PBNU belum membuat struktur posisi perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut.

"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," pungkash Yahya.

"Lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah (hilirisasi). IUP-nya belum ditanda tangani, kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan," lanjutnya.

Yahya pun mengucapkan terima kasih atas pemberian izin konsesi dari Jokowi. Ia mengaku siap akan mengerjakan usaha pertambangan tersebut.

"Kami sampaikan terima kasih ke presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP, jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," imbuh Yahya. Usai bicara kepastian izin pertambangan, Gus Yahya juga menyampaikan rencana NU masuk ke IKN. Ia menyatakan minat untuk membeli tanah di ibu kota baru.

"Dan kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN. Nanti insyaallah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya," jelasnya.

Ia mengungkapkan, tanah itu bakal digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas keagamaan. Gus Yahya menuturkan, Jokowi merestui sehingga NU akan segera berkomunikasi dengan Otorita IKN.

Gus Yahya mengatakan, untuk



Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf bersama jajaran PBNU menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (22/8/2024)

masuk berinvestasi di IKN, NU mengestimasi kebutuhan anggaran hingga Rp 3 triliun.

"Nah nilainya masih akan kita hitung. Ya mungkin kita butuh barang Rp 2 atau Rp 3 triliun. Bagaimana cara membayarnya? Ini kan soal pengaturan bisnis lain, ini bisa diatur," tuturnya.

Soal Cak Imin

Terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak ambil pusing GP Ansor akan melakukan apel kesetiaan PBNU bertepatan dengan Mukhtamar PKB ke-6 di Bali yang digelar 24-25 Agustus mendatang.

Cak Imin menyambut positif kegiatan tersebut jika diniatkan sebagai upaya meramaikan acara Mukhtamar PKB ke-6.

"Apapun dalam rangka meramaikan mukhtamar, monggo. Kita senang, apalagi mayoritas banser itu juga saudara-saudara kita juga, sahabat-sahabat kita juga. dan mungkin juga sebagian besar PKB," kata Cak Imin di kediamannya.

Kendati demikian, Cak Imin berharap seluruh pihak yang turut serta dalam apel tersebut tetap berkepal dingin dan tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Ia menyayangkan terdapat pihak ketiga yang hendak memecah belah persatuan antara nahdliyyin terkait konflik PKB-PBNU.

"Tolong jangan mudah diadu domba. ini ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba sesama warga NU," ujar dia.

"Karena PKB itu tidak hanya NU. PKB itu banyak pihak, tapi di PKB banyak warga NU. Jangan warga NU mau diadu domba, yang untung pihak ketiga," sambungnya.

Di sisi lain, Cak Imin pun merespons santai ketika ditanya apakah ada upaya pencegahan yang dilakukan PKB untuk menghindari kerusuhan akibat apel tersebut. Ia mengaku menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang berwenang dan berkewajiban

untuk menjaga keamanan.

Bahkan, Cak Imin mengaku akan mengirim bantuan logistik nasi kotak kepada GP Ansor jika mereka memiliki agenda yang padat dalam apel tersebut. "Nanti kalau memang kegiatan mereka banyak, kita kirim makanan, nasi boks. serius ini. saya sudah instruksikan kepada teman-teman," jelas dia.

"Nanti kalau ada apel banser di sekitar Bali ketika kita laksanakan mukhtamar, saya instruksikan ke DPW Bali dan juga panitia mukhtamar, menyediakan makan siang, makan siang gratis," sambungnya.

Sebelumnya, GP Ansor menginstruksikan kepada kader-kadernya se-Jawa Timur dan Bali untuk menggelar "Apel Kesetiaan Kepada PBNU" di Kabupaten Badung, Bali pada 21-25 Agustus. Surat ini telah dikonfirmasi oleh Addin Jauharuddin dan Wakil Ketua Umum PP GP Ansor Mabru L. Banuna, Rabu (21/8).

"Dalam rangka pelaksanaan kegiatan "Apel Kesetiaan Kepada PBNU" memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Bakti Sosial yang akan diselenggarakan pada Rabu-Minggu, 21-25 Agustus 2024 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pimpinan Pusat GP Ansor menginstruksikan kepada kader GP Ansor se-Jawa Timur dan Bali untuk hadir dalam kegiatan tersebut," bunyi isi surat instruksi PP GP Ansor tersebut.

Addin membenarkan kegiatan tersebut akan digelar selama lima hari hingga Minggu (25/8). Addin menjelaskan sengaja memilih tempat di Bali lantaran sebagai wilayah yang penuh keberagaman. Ia juga mengatakan acara ini digelar masih dalam suasana HUT ke-79 RI.

"Dan kita apel kebinekaan dan tasyakuran kemerdekaan RI di Bali. Sekaligus apel kesetiaan terhadap PBNU dan kiai," kata Addin.

PKB Bali buka suara

Ketua DPW PKB Bali Bambang Sutiyono menegaskan Mukhtamar PKB di Bali juga tidak terpengaruhi dan

Payung Hukum Ormas Agama Kelola Tambang (PP Nomor 25 Tahun 2024)

Detil peraturan

Aturan mengenai IUP itu tertuang dalam pasal 83A, yang kisi-kisinya sebagai berikut:

Ayat 1: Memberikan jatah izin tambang WIUPK pada ormas lewat badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. Wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP2B.

Ayat 3: IUPK dan/atau kepemilikan saham badan usaha ormas yang mengelola WIUPK tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Ayat 4: Kepemilikan saham ormas keagamaan dan badan usaha ormas tersebut harus mayoritas dan menjadi saham pengendali.

Ayat 5: Badan usaha ormas tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya maupun organisasi apapun yang merupakan afiliasinya.

tidak ada urusan dengan adanya kegiatan Banser.

"Jadi kami sama sekali tidak terpengaruh dan tidak ada urusannya dengan beliau, yang penting kami bermusyawarah ber-mukhtamar, kami bahagia atas maksimal hasilnya pileg kemarin. Yang penting kami konsentrasi dan fokus di mukhtamar saja," ujarnya.

Sementara, untuk pengamanan di Mukhtamar PKB di Bali, Bambang mengatakan itu sudah diserahkan ke pihak yang menanganinya.

"Sudah koordinasi dengan Mabes, Polda, bahkan kita sudah mengundang Kapolda, termasuk jauh-jauh hari sudah bertemu dengan Pecalang di (desa adat) Bualu, sama Bendesa. Kan kami kan secara jalurnya sudah mengikuti protokoler," ujarnya.

Sebanyak 30 hotel disiapkan untuk menampung ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan mengikuti Mukhtamar PKB di Bali, yang ditempatkan di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 25 Agustus 2024.

Bambang juga mengaku sudah menyiapkan 30 hotel di daerah Nusa Dua hingga di Jimbaran, Bali untuk menampung peserta Mukhtamar PKB.

"Itu 30 hotel pecah-pecah (ada di daerah) Nusa Dua dan sekitarnya. Yang saya tau mereka akan datang 23 dan 24 siap ber-mukhtamar begitu. Jadi memang sekarang kelihatan belum ada kegiatan," imbuhnya. (tro,rks,ant/dya)

10 Aduan Masyarakat soal Penyelewengan Pemdes Inspektorat Kabupaten Malang Audit 5 Desa



Kegiatan tinjau lapang dan audit di Desa Banjartengah, Kecamatan Dau Kabupaten Malang. (dok. instagram inspektorat.malangkab)

MALANG - Hingga Agustus ini sudah ada 10 pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan penyelewengan pemerintahan desa di Kabupaten Malang. Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Nurcahyo, mengungkapkan, saat ini 5 desa sedang dalam proses audit.

"Tahun ini dumas sekitar 10-an. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya banyak kalau diakumulasi. Tahun lalu ada sekitar 20 dumas," ujar Nurcahyo, Kamis (22/8/2024).

Nurcahyo menjelaskan tahun ini, pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat mencakup berbagai

masalah. Dengan mayoritas yakni aduan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pemanfaatan tanah kas desa.

"Kalau proses audit, kami memanggil semua pihak yang terkait untuk memberikan keterangan. Guna memastikan bahwa data yang kami olah akurat," tambahnya.

Menurut Nurcahyo, audit dilakukan secara bergantian dan sesuai dengan program kerja tahunan. "Sampai saat ini, lima desa sudah kami audit. Proses audit ini memerlukan waktu untuk memastikan setiap informasi yang diterima benar-benar

valid," jelasnya.

Nurcahyo juga menyebutkan, dari total 10 pengaduan yang diterima tahun ini, beberapa di antaranya berasal dari desa di Kecamatan Pagak, Desa Plaosan, serta desa di Kecamatan Karangploso. "Kami tengah menindaklanjuti setiap aduan ini dengan cermat. Setiap pengaduan yang masuk akan kami analisis untuk menentukan langkah selanjutnya," imbuhnya.

Selain dumas terkait DD/ADD, Nurcahyo menyebut penggunaan tanah kas desa juga paling sering diadukan oleh masyarakat. Hal ini mencakup dugaan penyimpangan dalam pencairan dana, serta alokasi penggunaan tanah yang tidak sesuai peruntukan.

Menurutnya, pada tahun 2023 kemarin, sejumlah kasus telah dilaporkan dan sebagian besar telah dilimpahkan ke penegak hukum. Nurcahyo menyebutkan, total kerugian dari kasus-kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 miliar. Sedangkan di tahun ini, pihaknya belum dapat memperkirakan total kerugian, sebab proses audit masih dilakukan.

"Sebagian besar dari kerugian tersebut sudah berhasil dikembalikan. Kami fokus pada penyelamatan dana serta penyelesaian administratifnya," terang Nurcahyo.

Dalam audit yang dilakukan,

Inspektorat juga berupaya memperbaiki sistem pengelolaan dana desa dengan memberikan rekomendasi kepada desa-desa yang terlibat.

Menurutnya, tindak lanjut dari audit ini akan melibatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan yang lebih serius. (Santi/Dya)



Tahun ini dumas sekitar 10-an.

Kalau tahun-tahun sebelumnya ya banyak kalau diakumulasi. Tahun lalu ada sekitar 20 dumas. Kalau proses audit, kami memanggil semua pihak yang terkait untuk memberikan keterangan. Guna memastikan bahwa data yang kami olah akurat,"

....

NURCAHYO

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang,



Pj Wali Kota Malang Optimalkan CSR untuk Dana Pembangunan

MALANG - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan berencana memaksimalkan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan. Sebab bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), akselerasi program sulit diwujudkan.

"Saya kira pelaku usaha di Kota Malang ini banyak sekali. Makanya, CSR dari pelaku usaha memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program pembangunan. Saya mandiri, akan mengoptimalkan pemanfaatan CSR sebagai alternatif dari APBD," ujar Iwan, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, langkah awal dari strategi ini akan fokus pada perencanaan program-program pembangunan yang akan dilakukan. Iwan menekankan, pentingnya pemetaan isu strategis di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai dasar untuk menentukan prioritas program.

"Ya, tentunya kami akan mengidentifikasi program-program yang memiliki dampak besar dan

membutuhkan pendanaan, baik dari APBD maupun CSR," jelasnya.

Setelah program terpetakan, sambungnya, langkah berikutnya yakni menentukan sumber pendanaan yang tepat. Dikatakan Iwan, Pemkot Malang akan mengevaluasi kebutuhan anggaran untuk setiap program dan menentukan apakah CSR dari pelaku usaha dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan.

Iwan juga menegaskan, program-program yang akan dirancang tidak hanya terbatas pada kegiatan event, seperti seminar, workshop, atau pameran, yang bersifat sementara. Tetapi juga mencakup program-program fisik.

Menurutnya, program fisik melibatkan proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Kami perlu mengetahui seberapa besar potensi CSR yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Ini penting agar kontribusi dari pelaku



Saya kira pelaku usaha di Kota Malang ini banyak sekali. Makanya, CSR dari pelaku usaha memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program pembangunan. Saya mandiri, akan mengoptimalkan pemanfaatan CSR sebagai alternatif dari APBD,"



Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. (Santi/Lenteratoday)

usaha dapat dimaksimalkan," jelasnya.

Di sisi lain, Iwan menjelaskan, CSR tidak akan menjadi satu-satunya alternatif pendanaan. Menurutnya, program-program prioritas akan diupayakan untuk mendapatkan dukungan dari APBD Provinsi Jawa Timur dan bahkan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi, dengan memaksimalkan CSR dan memadukannya dengan anggaran dari APBD, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik untuk pembangunan, yang nantinya juga berdampak pada masyarakat," pungkas Iwan. (Santi/Dya)

CERITA AYUMI SASAKI PASKIBRAKA KETURUNAN JEPANG KINI JADI PELATIH

MASIH ingat dengan Ayumi Putri Sasaki, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2022 yang dulu pernah viral?

Seperti diketahui, Ayumi Sasaki sempat jadi sorotan saat dirinya didapuk sebagai pembawa baki saat Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam upacara HUT Ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta.

Setelah menjadi Purna Paskibraka, Ayumi Sasaki mengaku ingin ikut tes Akademi Kepolisian (Akp) sesuai dengan cita-citanya.

Sayangnya, cita-cita Ayumi Sasaki belum terwujud lantaran dirinya gagal saat tes Akpol pada April 2024 lalu.

Ibunda Ayumi Sasaki, Agusnita Fitriyani mengatakan, putrinya mendapat nilai bagus saat tes.

Namun, nilai tersebut tak membawanya lolos ke tahap selanjutnya.

Ayumi lantas harus berpuas diri berada di peringkat 15.

Kendati begitu, Ayumi Sasaki tak menyerah begitu saja.

Ia sempat berniat mendaftar taruni Akademi Militer (Akmil). Namun, tahun ini tidak ada penerimaan taruni di Akmil.

Ia terus semangat menjaga kondisi fisiknya dengan berolahraga, agar kelak bisa kembali mengikuti tes Akpol.

Jadi Pelatih Paskibraka Provinsi

Gadis asal Banyuwangi, Jawa Timur itu kini memilih tinggal di Surabaya.

Saat ini ia pun dipercaya menjadi pelatih Paskibraka Provinsi Jawa Timur 2024.

Profil

Pada 2022 lalu, Ayumi Putri Sasaki tergabung dalam Tim Pancasila Sakti, tim yang bertugas menurunkan bendera Merah Putih.

Ayumi Putri Sasaki adalah

perempuan keturunan Jepang-Indonesia.

Ayumi Putri Sasaki merupakan siswi SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara.

SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara sendiri beralamat di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jatim.

Ayumi memiliki cita-cita masuk Akademi Kepolisian atau Akpol.

“

Lelah pasti, namun terbayar dengan pengalaman-pengalaman ‘mahal’ yang kami dapatkan. Kami bersyukur karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini,”

Ayumi Putri Sasaki

“Selamat ya sudah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Ini adalah tahap awal perjuangan kalian. Jangan berpuas diri, tetap jaga

prestasi, karena perjuangan ke depan masih panjang,” kata Bupati Ipuk saat menemui Ayumi di ruang kerjanya.

Pertemuan ini berlangsung santai dan hangat, Bupati Ipuk tampak menanyakan pengalaman Ayumi sebagai anggota paskibraka nasional.

“Bagaimana kesannya terpilih jadi petugas pembawa baki di Istana Negara?” tanya Bupati Ipuk.

“Pasti bangga dan senang, Bu,” jawab Ayumi.

Ayumi menceritakan suka dukanya selama menjalani karantina paskibraka nasional. Dikatakannya, menjadi anggota paskibraka nasional cukup melelahkan. Ada serangkaian latihan yang harus dijalani setiap hari mulai pagi, bahkan terkadang hingga malam hari.

“Lelah pasti, namun terbayar dengan pengalaman-pengalaman ‘mahal’ yang kami dapatkan. Kami bersyukur karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini,” ujar Ayumi semringah.

Ayumi mengaku gembira karena selama karantina, dirinya mendapat banyak teman baru dari berbagai daerah dan pelatih yang baik.

“Kami merasa sudah seperti saudara. Bahkan

pas saya ulang tahun, sempat di-prank oleh pelatih dan teman-teman. Ini menajdi kisah tersendiri buat saya. Menyenangkan bisa menjadi bagian dari paskibraka nasional,” kata Ayumi. (Tribun)



RISIKO KESEHATAN DARI KONSUMSI MAKANAN BERPENGAWET

DI ERA modern ini, makanan berpengawet sering kali menjadi pilihan praktis karena kemampuannya untuk memperpanjang masa simpan dan memudahkan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia juga memiliki hobi mengonsumsi makanan berpengawet, baik dalam bentuk camilan, makanan siap saji, maupun minuman kemasan.

Ketersediaan yang luas dan harga yang terjangkau membuat makanan berpengawet menjadi pilihan praktis bagi banyak orang, terutama di tengah kesibukan sehari-hari.

Selain itu, rasa gurih dan manis yang ditawarkan oleh produk-produk ini sering kali menggoda selera, meskipun banyak yang menyadari risiko kesehatan jangka panjang yang bisa ditimbulkannya, seperti gangguan metabolisme, obesitas, hingga penyakit kronis lainnya. Meski demikian, kebiasaan ini terus bertahan karena faktor kemudahan dan kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Kelompok masyarakat yang gemar mengonsumsi makanan berpengawet di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai usia dan latar belakang. Anak-anak dan remaja sering kali menjadi konsumen utama karena mereka menyukai rasa manis dan gurih yang ditawarkan oleh camilan dan minuman kemasan, yang juga mudah ditemukan di sekolah dan lingkungan bermain mereka.

Kelompok pekerja, terutama mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan waktu terbatas, juga kerap mengandalkan makanan berpengawet

sebagai solusi cepat dan praktis untuk mengisi perut di tengah jadwal yang padat.

Selain itu, di kalangan rumah tangga, ibu-ibu yang sibuk sering memilih makanan siap saji atau instan dengan pengawet untuk menghemat waktu memasak, terutama dalam situasi darurat atau ketika kebutuhan praktis menjadi prioritas. Meskipun kesadaran akan dampak kesehatan mulai meningkat, kebiasaan ini masih sulit dihilangkan karena alasan kepraktisan, ketersediaan, dan harga yang terjangkau.

Ragam Jenis Makanan Cepat Saji dan Kandungan Pengawetnya yang Sering Dikonsumsi Masyarakat Indonesia

Di Indonesia, berbagai jenis makanan cepat saji beredar luas di pasaran dan sering dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa contoh yang populer:

1. Mie Instan

Mie instan adalah salah satu makanan cepat saji paling populer di Indonesia. Tersedia dalam berbagai varian rasa, mie instan sering menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari makanan praktis dan cepat disiapkan.

2. Nugget Ayam dan Olahan Daging

Nugget ayam, sosis, dan bakso beku adalah contoh makanan olahan daging yang banyak dikonsumsi. Makanan ini biasanya digoreng atau dipanaskan dalam microwave, menjadikannya pilihan cepat untuk

sarapan atau makan siang.

3. Camilan Kemasan

Berbagai jenis keripik, biskuit, dan kue kering yang dikemas dengan pengawet juga sangat populer. Produk ini mudah ditemukan di toko-toko dan supermarket, serta sering menjadi camilan sehari-hari bagi masyarakat.

4. Makanan Kaleng

Makanan kaleng seperti sarden, kornet, dan buah-buahan kalengan merupakan pilihan lain yang sering dikonsumsi karena daya tahannya yang lama dan kemudahan dalam penyajiannya.

5. Minuman Kemasan

Minuman kemasan seperti teh botol, jus buah, minuman bersoda, dan minuman energi sangat populer di Indonesia. Minuman ini sering dikonsumsi sebagai pendamping makanan atau sebagai pelepas dahaga saat bepergian.

6. Roti Tawar dan Roti Isi

Roti tawar yang biasanya dikemas dalam plastik serta roti isi dengan berbagai rasa seperti cokelat, keju, atau daging sering dijadikan sarapan atau camilan cepat oleh banyak orang.

7. Pizza dan Burger

Produk makanan cepat saji internasional seperti pizza dan burger, yang biasanya dijual oleh jaringan restoran cepat saji, juga sangat digemari di Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan keluarga urban.

8. Makanan Beku Siap Masak

Berbagai makanan beku seperti dimsum, kentang goreng, dan ayam crispy yang tinggal dipanaskan atau digoreng juga sering dijadikan pilihan praktis untuk makan di rumah.

Jenis-jenis makanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia, terutama karena kepraktisannya, meskipun sering kali mengandung bahan pengawet dan aditif yang kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan.

Di balik kepraktisan dan rasa yang dirasa enak, makanan cepat saji juga mengandung ragam pengawet yang jika dikonsumsi dalam intensitas yang sering akan mendatangkan ragam dampak buruk bagi kesehatan seseorang. Berikut sajiannya:

1. Mi Instan

Pengawet: Tert-Butylhydroquinone (TBHQ), natrium benzoat, dan kalium sorbat. Kandungan Pengawet Menurut Kesehatan: TBHQ adalah pengawet

yang biasa digunakan dalam mi instan untuk memperpanjang masa simpan, namun dalam jumlah besar dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan perut, mual, dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya.

2. Sosis dan Nugget

Pengawet: Natrium nitrit, natrium nitrat, dan asam benzoat.

Kandungan Pengawet Menurut Kesehatan: Natrium nitrit dan natrium nitrat digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memberikan warna merah pada daging olahan.

Namun, pengonsumsi dalam jumlah besar dapat dikaitkan dengan risiko kanker, khususnya kanker usus besar.

3. Keripik dan Camilan Kemasan

Pengawet: Butil hidroksi anisol (BHA) dan butil hidroksi toluena (BHT). Kandungan Pengawet Menurut Kesehatan: BHA dan BHT adalah antioksidan yang digunakan untuk mencegah kerusakan lemak dalam makanan, tetapi beberapa penelitian menunjukkan potensi risiko karsinogenik dan gangguan hormon dalam konsumsi jangka panjang.

4. Minuman Bersoda dan Minuman Energi

Pengawet: Asam benzoat dan natrium benzoat. Kandungan Pengawet Menurut Kesehatan: Asam benzoat dan natrium benzoat dapat berpotensi berbahaya jika bereaksi dengan asam askorbat (vitamin C) yang ada dalam minuman, membentuk benzena, yang merupakan senyawa karsinogenik.

5. Pizza dan Roti Isi Siap Saji

Pengawet: Kalsium propionat dan asam sorbat. Kandungan Pengawet Menurut Kesehatan: Kalsium propionat digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur pada roti dan produk bakery lainnya. Konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala dan gangguan pencernaan pada beberapa individu.

6. Makanan Kaleng (Sarden, Kornet, dll.)

Pengawet: Natrium nitrit dan kalium sorbat.

Kandungan Pengawet Menurut Kesehatan: Natrium nitrit, yang digunakan dalam makanan kaleng untuk mencegah pertumbuhan bakteri, terutama Clostridium botulinum, dapat menjadi karsinogenik jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. (nei,ist/dya)



APPLE PODCASTS TERSEDIA DI WEB

APLIKASI Apple Podcasts kini tersedia di semua peramban web utama seperti Chrome, Edge, Firefox, dan Safari di lebih dari 170 negara menurut pengumuman Apple pada Senin (19/8).

Penyediaan aplikasi di semua peramban web akan memudahkan siapapun yang memiliki peramban web di perangkat apapun untuk mengakses siniar.

Layanan mendengarkan lewat web telah tersedia selama beberapa waktu. Namun, untuk mendengarkan sebuah episode, pengguna harus lebih dulu mencari acara di mesin pencari dan membuka halaman Pratinjau Apple Podcasts acara tersebut.

Kini Apple Podcasts di web telah meluncurkan antarmuka baru, memungkinkan pengguna mengakses fitur yang sebelumnya hanya tersedia di aplikasi. Ini termasuk menjelajahi jutaan acara, mengakses bagian seperti perpustakaan dan tangga lagu teratas, membeli langganan siniar premium, dan banyak lagi.

Selain itu, pendengar dapat menyinkronkan Akun Apple mereka agar dapat menjeda siniar dan menyimpan kemajuan pemutarannya untuk didengarkan nanti, serta melihat acara dan langganan yang diikuti.

Pengguna tanpa Akun Apple pun dapat menggunakan pengalaman web ini, tetapi hanya dapat menelusuri dan mendengarkan saja.

Apple Podcasts bergabung dengan berbagai perusahaan rintisan dan platform indie dengan pemutar siniar berbasis web seperti Castbox, Podbay,

Podcast App, dan Podurama, serta raksasa streaming musik YouTube Music, Amazon Music, dan Spotify.

Penambahan ini kemungkinan besar akan diterima dengan baik oleh penggemar siniar yang memilih untuk tidak menginstal aplikasi lain tetapi tetap ingin mengakses fitur tertentu.

Bagi "podcaster", Apple Podcasts di web memungkinkan mereka membagikan tautan ke episode, acara, dan saluran sehingga bisa menjangkau khalayak yang lebih luas.

Pengguna dapat mengunjungi podcasts.apple.com untuk melihat situs baru, demikian menurut siaran TechCrunch pada Senin (19/8) waktu setempat.

Transkrip

Sebelumnya, Apple memperkenalkan fitur transkrip untuk Apple Podcasts, sebuah fitur baru inovatif yang membuat podcast lebih mudah diakses dan lebih mudah dinavigasi.

Dengan transkrip, pengguna dapat membaca teks lengkap dari sebuah episode siaran podcast, mencari kata atau frasa tertentu, dan mengetuk teks untuk memutar podcast dari titik tersebut dalam episode. Saat episode diputar, setiap kata akan disorot, sehingga mudah diikuti.

"Transkrip di Apple Podcasts merupakan komitmen Apple untuk membuat produk dan layanan bagi semua orang, kami sangat senang dapat menyediakan transkrip secara luas untuk semua orang, menambahkan lapisan aksesibilitas tambahan pada pengalaman mendengarkan

Podcast," kata Direktur Senior Apple, Global Accessibility Policy & Initiatives Sarah Herrlinger melalui rilis pers di situs resmi Apple.

Transkrip dapat meningkatkan pengalaman podcast pengguna dengan berbagai cara, membantu mereka menangkap setiap kata dari pembawa acara favorit mereka, mempelajari bahasa baru, dan lebih mudah menemukan fakta yang mereka dengar dalam sebuah episode.

"Pengguna dapat mengakses transkrip episode dari sudut kiri bawah pada layar Now Playing, dengan menggunakan iPhone dan iPad dengan iOS 17.4 dan iPadOS 17.4," ujar Herrlinger.

Transkrip dibuat untuk memperkuat aksesibilitas. Jenis huruf dan kontras warna dirancang untuk membuat teks yang panjang menjadi lebih mudah dipindai dan dibaca.

Pengguna disabilitas atau memiliki gangguan pendengaran juga dapat mengakses transkrip tanpa harus menekan tombol putar pada episode.

Fitur ini akan tersedia untuk Apple Podcast di lebih dari 170 negara, ditulis dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol, tetapi tidak akan menerjemahkan transkrip podcast dari satu bahasa ke bahasa lainnya.

Meskipun transkrip nyaman bagi pengguna, banyak penyiar podcast mewaspadaai kesalahan yang dapat terjadi dengan alat transkripsi otomatis. Apple tampaknya telah mempersiapkan hal ini.

Penyiar yang tidak ingin menggunakan transkripsi otomatis

dari Apple dapat memilih untuk mengunggah transkrip mereka sendiri melalui tag RSS atau di Apple Podcasts Connect untuk episode premium, atau mereka dapat mengunduh dan mengedit transkrip Apple sebelum mengunggah ulang (Antara)



Kampoeng Tempo Doeloe

MENIKMATI KULINER NUSANTARA DI FESTIVAL KAMPOENG TEMPO DOELOE

INDONESIA dengan keragaman budayanya, juga memiliki kekayaan kuliner yang tak tertandingi. Salah satu cara untuk mengeksplorasi berbagai cita rasa tradisional nusantara adalah melalui Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe.

Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe kembali digelar untuk memanjakan para pecinta kuliner Nusantara. Acara ini merupakan salah satu acara tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin menjelajahi berbagai hidangan khas dari berbagai daerah di Indonesia.

Jf3 Food Festival kembali menggelar Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe (KTD) dan menghadirkan ragam kuliner Nusantara yang digelar di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus hingga 29 September 2024.

"Tema 'Selera Nusantara' yang kami angkat tahun ini tidak hanya mengajak pengunjung untuk menikmati beragam hidangan, tetapi juga untuk merasakan kekayaan budaya yang melekat pada setiap sajian," kata Chairman JF3 Soegianto Nagaria di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe menghadirkan beragam stan

kuliner yang menawarkan aneka hidangan tradisional dari Sabang hingga Merauke. Pengunjung bisa merasakan sensasi menikmati kuliner khas nusantara dengan cita rasa yang autentik dan menggugah selera. Tahun ini, Kampoeng Tempo Doeloe menghadirkan lebih dari 1.000 menu makanan Indonesia oleh 102 gerai kuliner legendaris dari berbagai daerah.

Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga wilayah timur Indonesia. Kampoeng Tempo Doeloe diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal sekaligus mengajak masyarakat untuk mengenal budaya Nusantara melalui ragam makanan khas daerah setempat.

Tidak hanya kuliner, Kampoeng Tempo Doeloe juga menghadirkan ragam hiburan menarik, antara lain panggung musik dan pertunjukan tradisional yang digelar setiap hari selama 45 hari festival itu digelar.

Ada juga berbagai lomba permainan tradisional yang telah digelar pada 17 Agustus 2024 untuk merayakan HUT RI ke-79. Menariknya, setiap hari Sabtu pukul 19:00 WIB, panggung musik di festival itu akan dimeriahkan oleh deretan penyanyi serta musisi ternama Indonesia. Ada Lyodra yang tampil pada 17 Agu

stus 2024, Yovie & Nuno pada 24 Agustus, Fabio Asher pada 31 Agustus,

Rony Parulian pada 7 September, Tiara Andini pada 14 September, Keisya Levronka pada 21 September, dan Nadhif Basalamah pada 28 September 2024. Bagi pengunjung yang ingin datang ke Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe, pengunjung tidak akan dikenakan biaya masuk atau gratis.

Namun, pengunjung dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar ke area dalam festival. Kampoeng Tempo Doeloe dibuka mulai pukul 16:00 - 22:00 WIB, sementara pada Jumat, festival dibuka mulai pukul 16:00 - 23:00. Pada Sabtu, festival dibuka pada pukul 11:00 - 23:00 dan Minggu serta hari libur pada pukul 11:00 - 22:00 WIB. Selain "Kampoeng Tempo Doeloe," JF3 Food

Festival juga mengadakan "Wonderful Culinary Expo" di lokasi yang sama untuk menghadirkan ragam gerai bercita rasa global, seperti 7hundred ML, Asian Cigar Company, Healthy Choice, dan lainnya. (nei,ist/dya)

Tema 'Selera Nusantara' yang kami angkat tahun ini tidak hanya mengajak pengunjung untuk menikmati beragam hidangan, tetapi juga untuk merasakan kekayaan budaya yang melekat pada setiap sajian

Chairman JF3 Soegianto Nagaria di La Piazza



RUU Pilkada Batal... (dari Hal 1)

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan tetap mengikuti aturan Mahkamah Konstitusi menyusul pembatalan sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Politisi dari Faksi Gerindra itu menyebut proses pembahasan revisi UU Pilkada harus melalui tahapan yang diatur tata tertib DPR.

"Karena pada hari Selasa, 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada, maka yang berlaku keputusan MK, judicial review (pengujian UU) yang diajukan Partai Buruh dan Gelora," kata Sufmi saat berbicara dalam konferensi pers di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Dia menegaskan revisi UU Pilkada masih akan terus dikaji dalam periode ke depan, untuk "menyempurnakan pelaksanaan pilkada."

Namun, kepada kantor berita Reuters, Sufmi mengatakan pembahasan revisi RUU Pilkada ada berlanjut pada masa sidang DPR berikutnya. Artinya, pembahasan akan dilanjutkan setelah Presiden Joko Widodo menyelesaikan masa jabatan kedua dan terakhirnya pada Oktober nanti.

DPR sedianya menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada, Kamis (22/8/2024) ini, tetapi sidang ditiadakan setelah jumlah peserta rapat tak quorum.

Istana Kepresidenan menyebut DPR dan pemerintah akan mengikuti aturan terakhir, yakni putusan MK, jika tak ada pengesahan revisi UU Pilkada hingga 27 Agustus.

Demonstrasi pecah di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, menuntut DPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Serentak 2024.

Namun, DPR melalui Badan Legislasi sedang mengkaji revisi UU Pilkada dengan mengikuti aturan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Sulistyowati Irianto menyebut, masyarakat belum boleh lengah setelah DPR RI menyatakan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada batal disahkan pada Kamis (22/8/2024) hari ini. Sulis mengatakan, publik tetap berisiko karena "prank" DPR RI dan pemerintah.

"Belum (boleh lengah)," kata Sulis.

Sulis menyerukan kepada masyarakat luas agar tetap berpihak pada konstitusi, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Kedua putusan yang sudah final dan mengikat itu sempat hendak dianulir DPR RI melalui RUU Pilkada. "Meskipun langit runtuh, kita harus

tetap berpihak pada konstitusi," ujar Sulis.

Dihubungi secara terpisah, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng mengatakan, tidak ada mekanisme pembatalan RUU yang sudah masuk dalam sidang paripurna di DPR RI.

Menurut dia, RUU itu hanya akan dibiarkan saja oleh DPR RI sampai muncul kesepakatan untuk kembali dibahas. Namun, masa jabatan DPR RI periode ini akan segera habis sehingga kemungkinan akan diserahkan ke anggota periode 2024-2029. "Misalnya dia mau di-carryover berikutnya, ataukah dia sekalian dia diganti tergantung nanti di prolegnasnya, prolegnas berikutnya," ujar Uceng.

Ia menilai, saat ini publik hanya bisa berpegang pada janji yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Berdasarkan penuturan politikus Partai Gerindra itu yang menyebut RUU Pilkada tidak akan dibahas hingga masa pendaftaran calon kepala daerah, pembahasan kemungkinan akan dilaksanakan pada 27 atau 29 Agustus.

Meski demikian, kata Uceng, walaupun RUU Pilkada kembali dibahas tetap tidak akan bisa membuat putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bisa menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Adapun Kaesang tidak bisa mencalonkan diri karena usianya baru 29 tahun ketika masa pendaftaran calon kepala daerah. "Dengan begini kan berarti Kaesang sudah enggak bisa maju. Kecuali dia hanya bisa maju menjadi wali kota, karena kalau gubernur kan enggak bisa, batasnya (minimal) 30 (tahun)," tutur Uceng.

KPU: Pendaftaran Sesuai MK

KPU RI memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

"Yang pasti, nanti pada tanggal 27-29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Afif pun memastikan bahwa putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia calon dan ambang batas pencalonan, tetapi juga termasuk aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh MK.

"Itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, KPU akan menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan DPR.

Menurutnya, KPU belajar dari pengalaman agar tidak mendapat sanksi karena salah prosedur dalam menerapkan putusan MK.

"Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah, putusan MK kami tidak lanjut, langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan," ucapnya.

Afif menyebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyoal pembahasan konsultasi dengan Komisi II DPR RI.

Menurut dia, rapat dengar pendapat (RDP) bakal dilakukan pada Senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.

"Konsultasi yang sifatnya RDP itu Senin. Kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya," ucap Afif.

Penangkapan Demonstran

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar Polda Metro Jaya segera melepas 159 peserta aksi demonstrasi di depan DPR RI, Kamis (22/8/2024) hari ini. "Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Snis menyebut, Komnas HAM menyoal penangkapan tersebut karena aksi demonstrasi adalah hak untuk bersuara dan berpendapat. Selain itu, catatan Komnas HAM juga menyoal pembubaran secara paksa aksi unjuk rasa yang terjadi di Gedung DPR oleh aparat penegak hukum.

"Keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," ucap Anis.

Terakhir, Komnas HAM mendorong agar penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Anies menyebut, hal ini perlu dilakukan atas dasar penghormatan dan perlindungan kebebasan berpendapat. "Dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Anis.

Senada, Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menyebut sekitar 50 orang ditangkap polisi saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024). "Yang di DPR, tadi ditahan itu sekitar 50-an orang," kata Adian di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024) malam.

Oleh karena itu, Adian menyambangi Polda Metro Jaya untuk memastikan berapa jumlah demonstrasi yang ditangkap oleh polisi.

"Spontanitas saja. Tadi melihat di jalan. Terus ngobrol sama teman-teman, 'eh, kita harus berbuat sesuatu. Paling tidak, kita harus melihat

mereka, tanya, apakah semua sesuai prosedur hukum atau sebagainya,'" ungkap Adian.

Terlepas dari itu, Adian ingin memastikan bahwa tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan berlangsung. Sementara itu,

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi belum bisa memastikan penangkapan peserta aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," kata dia. (tro,sum,rls,ant/dya)

**PUTUSAN MK SOAL
AMBANG BATAS PARNPOL
DI PILKADA 2024**

**Pasal yang digugat oleh Buruh dan Gelora
itu ialah Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.**

**Adapun isi Pasal 40 ayat (3)
UU Pilkada itu ialah:**
Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Adapun isi pasal 40 ayat (1) yang
diubah itu ialah:**
Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan

**Berikut amar putusan MK yang
mengubah pasal 40 ayat (1) UU Pilkada:**

Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- UNTUK MENGUSULKAN CALON
GUBERNUR DAN CALON WAKIL
GUBERNUR:**
- a. Di provinsi dengan penduduk **hingga 2 juta jiwa**, partai harus meraih minimal **10% suara sah**.
 - b. Di provinsi dengan penduduk **2 juta-6 juta jiwa**, partai harus meraih minimal **8,5% suara sah**.
 - c. Di provinsi dengan penduduk **6 juta-12 juta jiwa**, partai harus meraih minimal **7,5% suara sah**.
 - d. Di provinsi dengan penduduk **lebih dari 12 juta jiwa**, partai harus meraih minimal **6,5% suara sah**.

- UNTUK MENGUSULKAN CALON BUPATI
DAN CALON WAKIL BUPATI SERTA CALON
WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI
KOTA:**
- a. Di kabupaten/kota dengan penduduk **lebih dari 250 ribu jiwa**, partai harus memperoleh minimal **10% suara sah**.
 - b. Di kabupaten/kota dengan penduduk **250 ribu hingga 500 ribu jiwa**, partai harus memperoleh minimal **8,5% suara sah**.
 - c. Di kabupaten/kota dengan penduduk **500 ribu hingga 1 juta jiwa**, partai harus memperoleh minimal **7,5% suara sah**.
 - d. Di kabupaten/kota dengan penduduk **lebih dari 1 juta jiwa**, partai harus memperoleh minimal **6,5% suara sah**.

Bersiap! 3 Pekan Lagi Konsumsi BBM Pertalite Dibatasi

JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan aturan pembatasan konsumen BBM Pertalite akan selesai tiga pekan lagi atau sekitar pertengahan September 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan ini merupakan regulasi hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014. "Ya kita lagi selesaikan regulasinya," katanya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Dadan menyebutkan regulasinya bisa terbit tiga pekan lagi. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik sejauh mana pembahasan beleid tersebut dilakukan dan apakah setelah terbit, pembatasan konsumen Pertalite langsung berlaku.

"Kita lagi finalisasi dari segi regulasinya mungkin dalam 3 minggu lagi selesai," tandasnya.

Ditemui terpisah, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi pembatasan konsumen Pertalite tengah disiapkan oleh Kementerian ESDM yang baru saja mengalami transisi kepemimpinan.

Pada Senin (19/8/2024) lalu, Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, menggeser posisi Arifin Tasrif yang sudah menjabat sejak Oktober 2019.

"Ya itu kan sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu. Ya ini kan kita lihat baru ada transisi kementerian ESDM. Kita tunggu saja," katanya singkat saat ditemui di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berharap aturan baru terkait pembatasan BBM bersubsidi selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur karena masih proses finalisasi.

"17 Agustus itu kan, waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa lock semuanya 1 September, peraturannya segala macam," ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subsidi BBM di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Rachmat mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih terus mempersiapkan aturan-aturan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi. Menurutnya, apabila tidak



Ketua PBNU KH Umarsyah (tengah) saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). (Ist)

dapat selesai pada Pemerintahan Presiden Jokowi, maka akan diteruskan oleh pemerintahan baru.

"Kita ingin coba mempersiapkan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi 'oleh-oleh' di pemerintahan baru," ujar Rachmat.

Pengamat Sebut Pilihan Opsinya

Saat ini harga Pertalite di SPBU Pertamina berada di angka Rp 10.000 per liter. Lalu subsidi solar atau biosolar seharga Rp 6.800 per liter.

Sayangnya, di lapangan masih ada saja oknum pengendara mobil mewah atau orang yang mampu menggunakan BBM jenis ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan, subsidi itu bertujuan untuk memastikan kelompok masyarakat tidak mampu mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau.

"Jadi tujuannya. Selalu definisi subsidi begitu," kata Direktur IESR beberapa waktu lalu.

Subsidi tentunya menggunakan APBN. Itu berarti uang rakyat hasil bayar pajak. Oleh karena itu harus dipastikan agar proses pengeluaran dana subsidi ini dilakukan seefektif mungkin. Fabby menjelaskan, terkait BBM, ada subsidi dan kompensasi. Ia mencontohkan minyak solar merupakan produk BBM subsidi. Lalu ada pula BBM pengurangan khusus seperti Pertalite.

"Untuk yang minyak solar harusnya memang dibatasi bagi kendaraan bukan kendaraan pribadi. Kalau sekarang kan setiap orang bisa beli solar. Truk tambang juga bisa beli solar di Pertamina. Padahal dia jualnya tambang. Harusnya tidak boleh kan?" katanya.

Fabby menilai pemerintah bisa melakukan pembatasan dengan menetapkan siapa yang layak membeli. "Itu bisa dicek misalnya diberikan zat tertentu, nanti warnanya

beda. Sehingga kalau ketahuan ada pengguna yang tidak seharusnya menggunakan bbm subsidi, dan tetap membelinya, bisa kena denda bahkan sampai pidana," tuturnya.

"Jadi menurut saya ya, straight saja. Selain kendaraan umum dan angkutan-angkutan yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh (beli solar subsidi)," ujar Direktur Eksekutif IESR ini.

Berikutnya tentang Pertalite. Ia melihat BBM jenis tersebut dijual bebas ke semua orang. Ada kompensasi dari pemerintah untuk Pertamina.

"Volumenya banyak. Menurut saya ini juga masalah, karena satu ya Pertalite itu dijual dengan di bawah harga keekonomian, tapi juga kualitas bahan bakar yang rendah gitu," ujar Fabby.

Selanjutnya, terkait penyaluran BBM subsidi saat ini. Fabby mengetahui ada aplikasi My Pertamina yang mengatur pendataan siapa yang berhak menerima BBM subsidi atau penugasan tersebut. Ia merasa bukan sesuatu yang sulit untuk mengaturnya. Hanya saja, menurutnya, persoalan ada di political will dan leadership Presiden Joko Widodo.

"Presiden itu tidak ingin popularitasnya turun. Beban anggaran naik terus karena dia tidak mau harga energi naik karena dia takut kehilangan popularitas. Jadi persoalannya itu bukan di teknisnya, tapi lebih kepada kemauan politiknya," ujarnya.

Ia berharap, Presiden membuat keputusan tidak populer jika memang diperlukan. Ini untuk menyelamatkan APBN di situasi ekonomi seperti sekarang.

Sementara, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyik memiliki rekomendasi untuk pemerintah dari CESS terkait distribusi BBM bersubsidi. Pertama, perlu ditetapkan secara jelas dan tegas terkait kuota BBM bersubsidi berdasarkan data

ANGGARAN SUBSIDI ENERGI MEMBENGKAK DI 2025

- RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 204,53 triliun. Anggaran ini meningkat bila dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp 192,8 triliun.
- Adapun rencana subsidi energi di tahun 2025 tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg dengan nilai Rp 114,3 triliun. Dan sisanya adalah untuk subsidi listrik sebesar Rp 90,21 triliun.
- Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun anggaran 2025 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP, subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter, volume BBM jenis solar sebesar 18.885 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 525 ribu kiloliter, dan volume LPG tabung 3 kg sebesar 8.170 juta kg.
- Selama periode 2020-2023, subsidi energi memang tercatat berfluktuasi. Dari dana subsidi sebesar Rp 108,84 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 164,2 triliun pada tahun anggaran 2023.

valid terkait jumlah masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Kedua, perlu dirancang, direalisasikan dan dikontrol secara ketat proses distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan batas kuota yang sudah ditetapkan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem distribusi BBM bersubsidi berbasis kewilayahan (spasial) agar optimal dan menghindari potensi kebocoran dan salah sasaran dalam distribusi BBM.

Keempat, masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait pemanfaatan BBM secara efektif dan efisien. Kelima, dalam jangka panjang perlu bauran energi (energy mix) yang lebih variatif sebagai bagian proses transisi energi menuju terwujudnya ketahanan energi nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, konteksnya adalah pemerintah menghindari supaya BBM subsidi ini tidak dinikmati orang kaya. Sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran ke golongan masyarakat menengah ke bawah. Ia menyinggung terbatasnya kuota penyaluran BBM bersubsidi itu. (sum,rls,ist,ant/dya)